TAJUK RENCANA

Menanti Langkah Indonesia Sebagai Penengah

berlangsung hingga kini. Empat bulan konflik bersenjata yang menghancurkan banyak infrastruktur dan pemukiman itu belum berhenti. Tidak berbilang, nyawa telah melayang. Militer Rusia terus melakukan agresi dan pasukan Ukraina telah diminta mundur dari Severodonetsk. Perang selalu menghancurleburkan juga menewaskan tidak hanya militer. Karena masyarakat sipil terutama perempuan dan anak telah menjadi korban.

Upaya perdamaian pun dilakukan. Dan Indonesia yang telah menjadi Ketua Presidensi Group of Twenty atau G20 tahun 2022, bisa mengambil kesempatan untuk menjadi penengah perdamaian konflik Rusia dan Ukraina. Selain itu, selama ini Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Sehingga memungkinkan berperan, karena tidak berpihak baik ke Ukraina maupun Rusia. Meski Indonesia memiliki hubungan baik dengan kedua negara.

Maka ketika Presiden Jokowi menyatakan akan bertolak ke Moskow akhir Juni mendatang (KR, 24/6) untuk menemui Putin maupun Zelenskyy, banyak pihak kaget, heboh namun kemudian mengapresiasi bahkan mendukung. Padahal seperti dikatakan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, ini bukan kunjungan biasa. Mengingat yang hendak dikunjungi merupakan kancah peperangan. Media asing pun membahas rencana kunjungan ini. Apalagi, selama ini belum ada pemimpin Barat maupun Asia, yang spesifik mengedepankan upaya damai. Presiden Jokowi adalah pemimpin Asia yang pertama.

Indonesia mengambil peran ini tentu tidak semata-mata saat ini memegang Presidensi G20. Meski hal itu juga bisa menjadi salah satu cara terbuka untuk menyelesaikan konflik dengan membawanya ke Mejelis Umum Perserikatan Bangsabangsa (PBB). Namun ada kewajiban konsitusional untuk turut dalam menjaga ketertiban dunia. Bukankah dalam Alinea IV Pembukaan UUD je-

PERANG Rusia – Ukraina masih las disebutkan : ... melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..... Dan menurut Menlu Retno, kunjungan Presiden Jokowi merupakan cerminan kepedulian terhadap kemanusiaan dan upaya memberikan kontribusi untuk menangani dampak yang dirasakan berbagai negara di dunia, akibat peperangan tersebut.

> Indonesia adalah negara yang cinta damai. Peran juru damai ini pun bukan pertamakali dilakukan Presiden RI. Artinya, misi perdamaian yang dilakukan ini bukanlah pertamakali dilakukan Presiden RI. Tahun 1995, Presiden Soeharto juga melakukan upaya serupa dalam konflik Bosnia Herzegovina yang seru bertempur. Waktu itu Presiden Soeharto adalah pemimpin Negara non-Blok yang juga nekat terjun ke arena konflik secara langsung. Tentu waktu itu, Soeharto juga mengenakan baju antipeluru dan kawalan paspampres lengkap. Hanya waktu itu belum ada media sosial (medsos). Sehingga kelengkapan dan pengawalan presiden tidak menjadi sesuatu yang 'dihebohkan', seperti sekarang. Karenanya itu adalah ketentuan keamanan.

> Kita berharap, kontribusi Indonesia akan membuahkan hasil baik. Indonesia bisa mengajak dialog negaranegara yang terlibat dalam konflik mencari solusi bersama. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia berpeluang menjadi juru damai yang tidak memihak. Sekali lagi, tidak ada kepentingan langsung Indonesia terhadap pihak yang berkonflik.

> Dunia menanti langkah Indonesia sebagai penengah di antara konflik Rusia Ukraina. Upaya perdamaian akan besar maknanya. Bila konflik bersenjata ini tidak dihentikan, banyak kekhawatiran akan berpotensi terjadinya Perang Dunia III. 🚨

Polemik Pergantian Kepala Daerah

PENIADAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) 2022 dan 2023 menjadi konsekuensi logis kekosongan pejabat definitif di berbagai daerah. Pengisian kekosongan pejabat kepala daerah untuk menyongsong pilkada serentak 2024 merupakan momentum krusial yang terus dibenahi. Hal ini tidak lepas dari lama kosongnya kursi kepala daerah yang ditinggalkan karena harus menyesuaikan dengan Pilkada 2024. Karena itu, pengisian kekosongan memang harus diisi agar mematuhi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor

1/2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1/2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota. Diskursus polemik di kalangan masyarakat tentu saja karena secara administratif, pengganti kepala daerah tidak memiliki wewenang yang luas layaknya kepala daerah definitif. Bagaimana pun, pejabat kepala daerah (PKD) hanya pengganti yang secara legitimasi memiliki keterbatasan. PKD tidak juga memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan strategis daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 bahkan ada larangan bagi penjabat kepala daerah dalam hal kebijakan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat daerah sebelumnya. Juga tidak bisa membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat /kepala daerah sebelumnya, dan larangan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerin-

Ada Dilemma

tahan dan program pembangunan peja-

bat sebelumnya.

Jika berkaca pada lamanya jabatan pengganti kepala daerah ini, ada dilemma yang ditimbulkan. Di satu sisi, tersendatnya program-program strate-

SAINS dan Teknologi (Saintek) meru-

gis yang semestinya terlaksana. Program inovatif dan kreatif yang awalnya kerap kali terselenggara, akhirnya mengalami stagnasi. Program-program unggulan serta kebijakan pembangun-

Aminuddin

an mengalami penurunan kualitas. Akhirnya, peningkatan kesejahteraan



rakyat tersendat. Sehingga perlu terobosan-terobosan hukum memberi ruang gerak penjabat kepala daerah agar bisa mengeksekusi program-program strategis.

Di sisi lain, lamanya pengganti pemerintah daerah menjabat membuatnya melampai wewenang. Diskursus ini kerap kali terjadi di berbagai daerah hingga tidak dihiraukan PKD. Berkaca pada pergantian Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku misalnya. Tahun 2020, pejabat bupatinya, Hadi Sulaiman, didemo kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Front Pembela Peduli Demokrasi (FPPD). Kelompok masyarakat ini menilai penjabat kepala daerah cenderung bermain politis karena membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Abdul Mukti

Keliobas tentang pengangkatan sejumlah caretaker kepala desa.

Keterlibatan Publik

Begitu pun polemik yang muncul di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus nonaktif karena wajib cuti selama masa kampanye pilkada. Saat nonaktif, ada agenda pembahasan APBD yang harus segera

ditetapkan. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang ditunjuk Mendagri pun melaksanakan tugasnya, yang salah satunya menetapkan APBD DKI terse-

Sejalan dengan itu, ikhtiar pemilihan kepala daerah secara demokratis, secara tidak langsung dirongrong proses pergantian pejabat daerah yang tidak transparan dan akuntabel. Keterlibatan publik juga belum pernah dilakukan. Padahal, sudah semestinya pergantian pejabat daerah juga dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan keterlibatan publik. Hal ini bertuiuan agar penunjukan pengganti pejabat daerah tidak dianggap bernuansa politik dan elitis. Keterlibatan publik juga penting agar percaya.

Apalagi menjelang pemilihan umum yang tidak hanya melibatkan publik, namun juga mengembalikan kepercayaan publik. \square

*) Aminuddin, pemerhati politik dan demokrasi, Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identi-

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik



Naskah dikirim Email atau WA pikiranpembaca@gmail.com

0895-6394-11000

Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Jalanan Semrawut di Dekat Stasiun Tugu

YOGYA kota pariwisata, sehingga ketika hari libur dipastikan jalanan menjadi padat. Bus wisata lalu lalang menjadi bagian dinamika lalu lintas kota Yogya. Ada yang perlu mendapat perhatian, yakni di Utara Stasiun Tugu Yogyakarta yang sangat padat karena kendaraan dari arah barat bertemu di jalan Marga Utama. Maka crowded tak bisa dihindarkan.

Untuk lebih melancarkan jalan, sebaiknya ada aparat keamanan lalu lintas yang jaga disitu agar menghalau kesemrawutan. Pasalnya, jadi sering

kena macet dan ada antrian panjang di lokasi tersebut. Apalagi sering ada becak yang menerobos melawan arus seenaknya, skuter mini yang ikut-ikutan nimbrung. Sehingga makin membuat suasana jalan parah banget. Pokoke crowded.

Saya pernah tinggal lama di Yogya. Mudah-mudahan imbauan saya yang tetap cinta Yogya, diperhatikan. Sehingga pariwisata Yogya tetap nyaman bagi sipapun pengguna jalan. 🛘 Hartono SH, Pagerandong

Mrebet, Purbalingga

Air Menggenang di Titik Nol

TITIK Nol adalah ikon Kota Yogya. Lihat saja, Kawasan yang dulu disebut 'air mancur' karena memang ada air mancurnya itu, kini sepanjang hari menjadi spot foto orang yang datang ke Yogya. Memanfaatkan bangunan kuno di sekitar, atau sekadar dudukduduk di bangku atau 'onde-onde' di pinggir jalan tersebut.

Namun sayang sekali, kalau hujan datang maka kawasan itu akan memunculkan genangan yang 'merusak pemandangan' terutama di sisi bagian utara. Tentu saja ini memunculkan

pertanyaan, apakah pembuangan air di kawasan itu tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik jalan air menuju gorong-gorong di bawahnya? Bahkan sampai usai hujan pun kadangkala genangan masih sampai setinggi trotoar jalan. Sehingga kalau dudukduduk untuk foto usai hujan, khawatir tersiram air jika ada kendaraan melintas terlalu mepet ke Utara jalan.

Ini kota wisata, kota budaya dan juga kota pendidikan. Tapi ikon kotanya memrihatinkan.

Asri, Wates Magelang

Fathorrahman Ghufron

Peran Unggul Saintek UIN Sunan Kalijaga

pakan salah satu fakultas yang menafasi transformasi IAIN Sunan Kalijaga (Suka) menjadi UIN pada 2004. Terlahir sebagai fakultas yang memfokuskan disiplin keilmuan di bidang kealaman (sains dan teknologi) pada 27 Juni 2004, keberadaannya di UIN Suka menjadi jantung keilmuan yang mengusung paradigma Integrasi-Interkoneksi. Sebab, dari Saintek, produksi pengetahuan yang berbasis kealaman di UIN Suka semakin massif, intensif, dan sistemik. Selain itu, saintek menjadi penanda

kuat terbangunnya ekosistem sinergitas ilmu-ilmu agama dan sains. Dengan berbagai ikhtiar akademiknya, saintek membangun ekosistem kreasi dan inovasi penelitian, pendidikan, dan pengabdian yang menitik-temukan antara aspek keagamaan dan aspek sains. Salah satu ikhtiarnya adalah, setiap tahun saintek mengadakan Konferensi Integrasi-interkoneksi Islam dan Sains (KIIS) dan International Conference on Science and engineering (ICSE) vang menyajikan berbagai kajian akademik dari dalam dan luar negeri.

Upaya ini menjadi sebuah kontribusi besar saintek untuk semakin meneguhkan posisi tawarnya dalam memperkuat paradigma keilmuan UIN Suka baik di lingkup internal maupun eksternal. Bahkan, dengan adanya fasilitas laboratorium yang memadai, saintek berupaya melahirkan temuan keilmuan baru yang semakin mendekatkan antara khazanah keagamaan dan saintifik. Di antara upaya yang sudah dirintis dan berjalan adalah lahirnya Halal Centre yang berkiprah di bidang uji kehalalan yang sangat dibutuhkan umat Islam di Indonesia maupun belahan dunia.

Di luar peran serta saintek dalam

mengembangkan sistem produksi keilmuan yang memadukan integrasi dan interkoneksi keilmuan, sejak tahun 2020 pula saintek mulai mengoptimalkan proses pengembangan keilmuannva tidak hanya pada wilayah akademik. Aspek tehnis dan administratif yang menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Pembelajaran mulai ditata secara managerial dan ditopang oleh model kolaborasi dengan berbagai pemangku, baik di lingkungan internal maupun eksternal.

Ekosistem Akademik

Dengan model kepemimpinan partisipatoris, dekan saintek mengajak berbagai simpul di lingkungan program studi (prodi) agar menaikkan peringkat akreditasinya sesuai dengan peraturan yang

baru. Walhasil, dari 8 prodi yang di saintek, ada 5 lima prodi yang sudah menyabet status Unggul dan 1 prodi yang sangat berpotensi kuat menjadi Unggul. Sedangkan 2 prodi lainnya yang fokus di Strata-2 (S-2) juga sedang berjibaku meningkatkan reputasi akademiknya agar menyamai bahkan melampaui prestasi di strata -1 (S1).

Di samping itu, untuk memperkuat ekosistem akademik yang Unggul, saintek menggandeng banyak lembaga pendidikan dan lembaga wirausaha di dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam berbagai skema kerja sama. Terlebih pemerintah membuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang harus didaptasi

dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Maka, kerja sama yang dilakukan saintek menjadi sebuah ceruk pengembangan yang sangat strategis agar bisa melibatkan berbagai komponen dalam sistem pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Dalam kaitan ini, untuk melakukan berbagai proses menjadi unggul di berbagai bidang tersebut, tentu tidak lepas dari kolaborasi internal yang saling bersinergi. Masing-masing civitas akademik saintek mengkhidmahkan dirinya menjadi bagian penting dalam mewujudkan saintek sebagai fakultas yang terbaik dan prima. Semoga, di usia ke-18 ini, saintek menjadi salah satu kiblat akademik yang bermanfaat bagi bangsa dan peradaban dunia. 🗅

*) Fathorrahman Ghufron, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fak Saintek UIN Sunan Kalijaga

Pojok KR

Sapi perah prioritas vaksinasi PMK -- Jangan sampai tak bisa diperah

Jemaah DIY sampai Makkah langsung umrah wajib

-- Pasti gembira, sedih dan haru rasanya

Pendidikan investasi peradaban sebuah bangsa

-- Hasil investasi itu tidak langsung tampak



Xedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Anggota SPS. I**SSN:** 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945 **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com,

iklankryk13@gmail.com

 $Langganan\ per\ bulan\ termasuk\ 'Kedaulatan\ Rakyat\ Minggu'...\ Rp\ 90.000,00,\ Iklan\ Umum/Display...Rp\ 27.500,00/mm\ klm,\ Iklan\ Keluarga...Rp\ Minggu'...Rp\ Ming$ $12.000,00\ /\mathrm{mm}\ \mathrm{klm},\ \mathrm{Iklan}\ \mathrm{Baris/Cilik}\ (\mathrm{min.}\ 3\ \mathrm{baris}.\ \mathrm{maks.}\ 10\ \mathrm{baris})\ .\ \mathrm{Rp}\ 12.000,00\ /\ \mathrm{baris},\ \mathrm{Iklan}\ \mathrm{Satu}\ \mathrm{Kolom}\ (\mathrm{min.}\ 30\ \mathrm{mm}.\ \mathrm{maks.}\ 100\ \mathrm{mm})\ \mathrm{Rp}\ 12.000,00\ /\ \mathrm{baris},\ \mathrm{Iklan}\ \mathrm{Satu}\ \mathrm{Kolom}\ (\mathrm{min.}\ 30\ \mathrm{mm}.\ \mathrm{maks.}\ 100\ \mathrm{mm})\ \mathrm{Rp}\ 12.000,00\ /\ \mathrm{baris}$ /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) lacktriangle Iklan Warna: Full Colour full Colour $Rp\,51.000,00/\,mm\,klm\,(min.\,600\,mm\,klm), Iklan\,Kuping\,(2\,klm\,x\,40\,mm)\,500\%\,dari\,tarif.\,Iklan\,Halaman\,I:\,300\,\%\,dari\,tarif\,(min.\,2\,klm\,x\,30\,mm,\,maks.\,Luping\,(2\,klm\,x\,40\,mm)\,500\%\,dari\,tarif\,(min.\,2\,klm\,x\,30\,mm,\,maks)$ 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir; 200% dari tarif , Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496549

jawab percetakan $\textbf{Alamat Homepage:} \ \text{http://www.kr.co.id} \ \text{dan www.krjogja.com.} \ \textbf{Alamat e-mail:} \ \text{naskahkr@gmail.com.} \ \textbf{Radio:} \ \text{KR Radio:} \ 107.2 \ \text{FM.}$

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

 $\textbf{\textit{Jakarta:}} \ Jalan \ Utan \ Kayu \ No. \ 104B, \ Jakarta \ Timur \ 13120, \ Telp \ (021) \ 8563602/Fax \ (021) \ 8500529. \ \textbf{\textbf{Kuasa Direksi:}} \ Ir \ Ita \ Indirani. \ Wakil \ Kepala \ No. \ 104B, \ No. \$ Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga emarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti. Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Wakil: Drs M Thoha

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprapto, SPd, Wakil: Asrul Sani Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.